

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013

Anim Rahmayati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta

email : anim.uci@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the financial performance of local governments Sukoharjo regency ratio analysis independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of harmony, growth ratio and the ratio DCSR. This type of research in this study was a descriptive quantitative research. The data used in this research is secondary data in the form of Local Government Finance Report Sukoharjo district in 2011-2013 were obtained using the documentation techniques. Methods of data analysis using financial ratio analysis. The results of this study showed that the financial performance of the Government of Sukoharjo is still not optimal. Although the Local Revenue management is effective and efficient, but the degree of independence of the region is still very low. This is evident from the amount of assistance from the central and provincial revenue than the original local Sukoharjo district. In addition, the use of funds are still not balanced because most of the funds used for operating expenditures rather than capital expenditure.

Keywords: *Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratio, Ratio Harmony, DSCR ratio*

Pengutipan :

Rahmayati, Anim (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, Vol. 2(2), 2022 61-72

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013. Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan tahun 2013 mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi dan kondisi perekonomian masyarakat pembayar yang belum stabil.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antaralain Pramono (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 sudah efektif, efisien, mengalami pertumbuhan positif serta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman. Namun demikian, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional daripada belanja modal.

Mariani (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami punurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2010) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggro Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk.

Mahmud, Kawung dan Rompas (2014) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara Bisma dan Susanto (2010) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antaralain; ketergantungan

keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Menurut Puspitasari (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2007-2011 sudah efektif, efisien dan pertumbuhan pendapatan meningkat. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang masih rendah dan sebagian besar dana masih digunakan untuk belanja rutin. Afriyanto dan Astuti (2013) juga menemukan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah dan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk belanja rutin daripada belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

2. KAJIAN LITERATUR

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan rutin di dalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Sumber PAD tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas dan lain-lain. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Mahmud, Kawung dan Rompas, 2014: 6).

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Yusuf (2010: 1) dalam Puspitasari (2013: 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholders* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya (Mariani, 2013: 5).

Menurut Mahmudi (2007: 14) dalam Halim (2014: 124) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu: mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward and punishment*, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah dapat menggunakan rasio kinerja untuk menganalisis kinerja keuangan daerah (Mahsun, 2009: 152). Rasio tersebut yaitu Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian yang terdiri dari rasio belanja rutin dan belanja modal terhadap total belanja, rasio pertumbuhan dan rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Menurut Puspitasari (2013) dapat terlihat beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Menurut Pramono (2014) menunjukkan bahwa rasio kinerja keuangan yang dapat dipakai yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DSCR. Menurut Mariani (2013) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah sesudah pemekaran dengan menggunakan rasio kemandirian dan rasio efisiensi. Menurut Mahmud, Kawung dan Rompas (2014) untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Menurut Azhar (2010) terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan menggunakan analisis rasio kemandirian dan rasio efisiensi.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2008: 47).

b. Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011, 2012 dan 2013.

c. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti (Adhiantoko, 2013: 46).

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut (Halim, 2007):

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Bantuan Pusat+Pinjaman

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007: 169)

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Pramono, 2014: 23). Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2009) adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	< 100%
Efektif Berimbang	= 100%
Efektif	> 100%

Sumber : Mahsun (2009: 187)

3) Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Pramono, 2014: 24).

Tabel 3
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisien	< 100%
Efisiensi Berimbang	= 100%
Tidak Efisien	> 100%

Sumber : Mahsun (2009: 187)

4) Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012 dalam Pramono, 2014: 25). Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

$$\text{Rasio belanja rutin/operasi} = \frac{\text{belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{belanja modal}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja modal terhadap total APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai selama beberapa periode (Halim, 2012 dalam Pramono, 2014: 26). Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PAD t0}}{\text{PADt0}}$$

6) Rasio DSCR

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5 (Pramono, 2014: 27).

$$\text{Rasio DSCR} = \frac{\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2012 dalam Pramono, 2014: 22). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan daerah) semakin rendah, dan sebaliknya.

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Rasio Kemandirian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2011	96.166.806.526,00	845.970.090.635,00	-	11,37%
2012	164.954.318.824,00	958.425.185.680,00	-	17,21%
2013	192.971.720.442,00	1.111.578.913.397,00	-	17,36%

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian kota Sukoharjo mengalami peningkatan yaitu 11,37% pada tahun 2011, 17,21% pada tahun 2012, dan 17,36% pada tahun 2013. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi. Kemampuan keuangan kabupaten Sukoharjo masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Pramono, 2014: 23). Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau

100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Rasio Efektivitas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2013

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2011	89.282.964.000,00	96.166.806.526,00	107,71%
2012	141.669.442.000,00	164.954.318.824,00	116,44%
2013	170.463.178.000,00	192.971.720.442,00	113,20%

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1,08% pada tahun 2011 menjadi 1,16% pada tahun 2012. Tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan 0,03% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,13%. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo sudah efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Pramono, 2014: 24).

Hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Hasil Perhitungan Rasio efisiensi

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2011	96.166.806.526,00	3.564.435.578,00	3,71%
2012	164.954.318.824,00	4.284.909.340,00	2,60%

2013	192.971.720.442,00	5.121.149.288,00	2,65%

Sumber : data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan dari 3,71% di tahun 2011 menjadi 2,60% di tahun 2012. Tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2,60% pada tahun 2012 menjadi 2,65% pada tahun 2013. Secara umum rasio efisiensi menunjukkan angka kurang dari 100% berarti bisa dikatakan bahwa Pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sudah efisien.

d. Rasio Kerasian

Rasio kerasian menggambarkan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase investasi yang di pakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Halim, 2012 dalam Pramono, 2014: 25)

Hasil perhitungan rasio kerasian pemerintah kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7

Hasil perhitungan rasio kerasian pemerintah kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2013

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total APBD	Rasio Belanja Modal terhadap Total APBD
2011	868.588.001.710,00	97.153.874.221,00	969.298.855.931,00	89,61%	10,02%
2012	962.478.090.460,00	233.723.888.487,00	1.196.799.260.947,00	80,42%	19,53%
2013	1.068.994.107.655,00	209.691.364.140,00	1.281.648.110.545,00	83,41%	16,36%

Sumber : data di olah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi/belanja rutin. Rasio kerasian pada belanja rutin mengalami penurunan dari 89,61% pada tahun 2011 menjadi 80,42% pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan

pada tahun 2013 menjadi 83,41%. Sedangkan rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil yaitu 10,02% pada tahun 2011, 19,53% pada tahun 2012 dan 16,36% pada tahun 2013.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai selama beberapa periode (Halim, 2012 dalam Pramono, 2014: 26).

Tabel 8
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pertumbuhan Realisasi PAD	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi	Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal
2011	-	-	-	-
2012	71,53%	19,90%	10,81%	140,57%
2013	16,98%	12,17%	11,07%	-10,28%

Sumber : data di olah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PAD kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni sebesar 71,53% pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis yakni hanya sebesar 16,98%. Realisasi pendapatan pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 19,90% dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan pada tahun 2013 yakni hanya sebesar 12,17%.

Sedangkan belanja operasi pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari 10,81% pada tahun 2012 menjadi 11,07%. Belanja modal pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sangat tinggi yaitu sebesar 140,57% dan mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2013 yakni hanya sebesar 10,28%.

f. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5 (Pramono, 2014: 27).

Tabel 9
Hasil Perhitungan Rasio DSCR

Keterangan	2011	2012	2013
PAD	96.166.806.526,00	164.954.318.824,00	192.971.720.442,00

Dana Bagi Hasil	43.243.409.925,00	32.764.394.918,00	27.938.065.286,00
DAU	564.840.146.000,00	680.235.009.000,00	763.462.900.000,00
Belanja Wajib	644.509.090.369,00	737.843.332.970,00	790.071.373.196,00
Angsuran Pokok Hutang	92.552.532,00	2.361.796.282,00	92.552.532,00
Belanja Bunga	57.908.963,00	47.003.832,00	35.857.033,00
Rasio DSCR	39705,36%	5816,61%	151313,74%

Sumber : data di olah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sangat baik dikarenakan rasio DSCR nya diatas 2,5 yakni 397,05 pada tahun 2011, 58,17 pada tahun 2012 dan 1513,14 pada tahun 2013.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah dengan rasio kemandirian daerah dibawah 25% yakni rata-rata hanya sebesar 15,31%.
- b. Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari 107,71% tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan yakni sebesar 113,20%, tetapi masih termasuk kriteria efektif.
- c. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% pada tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013.
- d. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 89,61% pada tahun 2011, 80,42% pada tahun 2012 dan 83,41% pada tahun 2013. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih sangat rendah yakni sebesar 10,92% pada tahun 2011, 19,53% pada tahun 2012 dan 16,36% pada tahun 2013.
- e. Jumlah pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang sangat positif signifikan pada tahun 2012 sebesar 71,53%, walaupun pada tahun 2013 turun drastis menjadi 16,98%. Begitu juga dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 19,90% kemudian turun menjadi 12,17%.

- f. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio DSCR yang rata-rata diatas 2,5.

Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya berupaya meningkatkan Pendapatan asli daerahnya dengan cara melakukan Revitalisasi pasar, Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya retribusi bagi pemerintah, Penyuluhan kepada pemungut pajak untuk lebih intensif dalam memungut pajak daerah sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang.
- b. Belanja rutin daerah sebaiknya ditekan dan sebaliknya belanja modal lebih ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

6. REFERENSI

- Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Afriyanto dan Astuti, W. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi SI Akuntansi*. 1 (1).
- Azhar, M. K. S. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*. 2 (1): 57-70.
- Bisma, I., D., G., dan H. Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. *Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus*. 4 (3): 75-86.
- Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Machmud, M., G. Kawung, dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14 (2): 1-13.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mariani, L. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. *Jurnal Akuntansi*. 1 (2).
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*. 7 (13): 83-112.
- Puspitasari, A. F. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 1 (2): 1-22.